

**COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PENERAPAN PERWALI NO
79 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI
KOTA SURABAYA**

Allya Tsamarah Yunifar

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
allyatsamarah.04@gmail.com;

Bambang Kusbandrijo

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
b_kusbandrijo@untag-sby.ac.id;

Anggaeny Puspaningtyas

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
anggraenypuspa@untag-sby.ac.id.

ABSTRAK

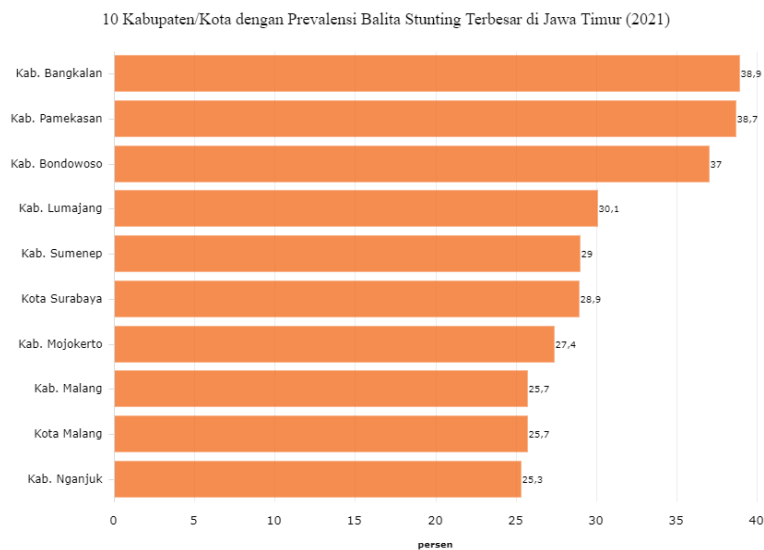
Stunting merupakan gangguan pada tumbuh kembang anak yang sangat lambat, Sehingga memberikan gizi buruk dan meminimalisir kecerdasan pada anak. Menurut World Health Organization (WHO) bahwa kasus stunting disebabkan karena adanya kebutuhan nutrisi yang tidak sesuai standar pada anak. Stunting menjadi fokus utama Pemerintah Kota termasuk Kota Surabaya. Berdasarkan pada Peraturan Walikota Surabaya No 79 Tahun 2022 tentang penurunan stunting yang mengatakan bahwa dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan tercapainya tujuan pembangunan maka dibutuhkan adanya penurunan stunting. Meskipun pada data prevalensi stunting di Kota Surabaya menurun, Pemerintah Kota Surabaya tetap menghimbau kepada masyarakat dan jajaran stakeholder untuk mengatasi kasus stunting ini. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kerjasama dengan para stakeholder dari sektor swasta, akademisi, LSM, Media Massa dan jajaran Dinas – Dinas lainnya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis Collaborative Governance Pada Penerapan Perwali No. 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya dan Untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung Collaborative Governance Pada Penerapan Perwali No. 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian ini adalah bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta, Media Massa, LSM, dan Akademisi sudah baik komunikasi yang dilakukan terjalin dengan baik, serta hasil kolaborasi yang dilakukan berdampak baik karena prevalensi stunting selalu turun dari tahun ke tahun hanya saja yang menjadi penghambat dalam penanggulangan stunting adalah terkait dengan mobilitas penduduk di Kota Surabaya yang sangat tinggi.

Kata kunci: *Collaborative Governance, Stunting, Perwali*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara berkembang dengan banyaknya jumlah penduduk yang kian meningkat setiap tahunnya dan kemajuan teknologi yang berkembang pesat di Indonesia. Namun dengan adanya jumlah penduduk yang terus meningkat, sektor kesehatan dan pengangguran pun juga meningkat. Salah satunya adalah penyakit Stunting, Stunting masih banyak terjadi di Indonesia pada tahun 2018 berjumlah 30,8% dan pada tahun 2021 turun menjadi 24,4% berdasarkan dari hasil survei status gizi Indonesia (Bayu, 2022). Menurut World Health Organization (WHO) mengatakan bahwa jika prosentase masih lebih dari 20% maka masalah kesehatan stunting itu masih dianggap kronis. Meskipun dari hasil data tersebut mengalami penurunan, Pemerintah tidak menganggap itu sebagai hal yang biasa. Karena stunting bisa terjadi secara berkelanjutan. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan diwujudkan sebagai cita – cita bangsa Indonesia. Untuk itu Pemerintah berupaya meminimalisir kasus stunting dengan kerjasama Kementerian atau Lembaga – Lembaga tertentu.

Kasus stunting di Indonesia masih dianggap kronis. Karena dalam prevalensi diatas masih lebih dari 20%, Namun target Pemerintah untuk tahun 2024 turun hingga menjadi 14,0. Sehingga Pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat dan kader untuk mengutamakan masalah kesehatan ini. Permasalahan yang terjadi di Indonesia harus diselesaikan secara transparan, Karena untuk meminimalisir suatu masalah dibutuhkan adanya kerjasama antara pemerintah dengan partisipasi masyarakat. Meskipun pada data prevalensi stunting di Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) mengalami penurunan dari tahun ke tahun, Masih terdapat beberapa provinsi yang menjadi prevalensi angka stunting tinggi yaitu salah satunya adalah provinsi Jawa Timur, Pada Provinsi Jawa Timur terdata bahwa memiliki balita sangat pendek sebanyak 47, 511 dari hasil data Ditjen Bina Pembangunan Daerah (KEMENDAG RI, 2022). Karena Jawa Timur sebagai kontributor utama dalam menurunkan kasus stunting secara nasional, Jika semua bertekad dan bekerjasama untuk mengatasi masalah yang terjadi di lingkungan Indonesia. Maka, Dengan adanya kondisi ini, Kasus stunting menjadi fokus utama bagi seluruh pihak Pemerintah Kota atau Kabupaten dalam provinsi Jawa Timur (Kompas.com,2022).



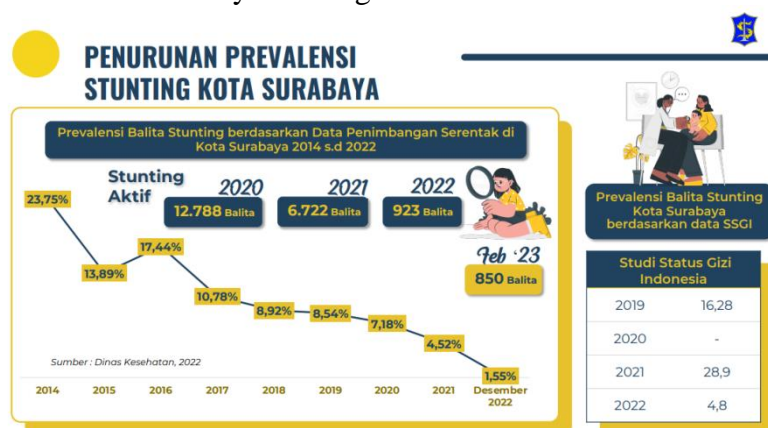
Gambar 1.1 Grafik Stunting di 10 Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2021
Sumber: Katadata.com

Berikut data diatas menunjukkan bahwa 10 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur masih memiliki prosentase yang dianggap kronis dalam mengatasi stunting, Kota yang menduduki peringkat pertama adalah Kabupaten Bangkalan dengan 38,9%, di urutan kedua Kabupaten Pamekasan dengan 38,7%. Seperti yang kita lihat 2 Kabupaten ini sangat dekat jaraknya namun pemerintah di daerah tersebut tidak memaksimalkan adanya penurunan stunting ini dengan baik dan diimbangi dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Urutan ketiga diduduki oleh Kabupaten Bondowoso dengan 37%, dan selanjutnya urutan keempat ditempati oleh Kabupaten Lumajang dengan 30,1%. Keempat kabupaten ini masih dianggap sebagai zona merah yang berarti sangat kronis, Pemerintah Pusat memberikan himbauan dan membantu agar stunting di keempat Kota/Kabupaten masing – masing menurun. Namun pada urutan kelima hingga kesepuluh bukan berarti tidak kronis, melainkan menjadi zona oranye dan masih dianggap kronis karena prosentasenya menunjukkan lebih dari 20% (Kusnandar, 2021). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah untuk tidak membiarkan hal ini sebagai hal yang biasa karena kasus stunting bisa terjadi karena program – program yang diberikan pemerintah tidak berjalan dengan lancar dan masyarakat acuh tak acuh dengan adanya kasus stunting yang terjadi di lingkungan sekitar mereka.

Collaborative Governance dapat diartikan sebagai suatu kerjasama antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan adanya proses tertentu untuk memberikan suatu kebijakan dan aturan hukum yang berlaku agar bisa digunakan sebagai tonggak dalam negara Indonesia (Arasti, 2021). Untuk itu, Pemerintah harus memperhatikan permasalahan – permasalahan yang terjadi di Indonesia dan memberikan solusi untuk memberantas semua permasalahan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari tujuan yang dibentuk. Teori *Collaborative Governance* bisa melibatkan semua pelaku kepentingan antar aktor, antar organisasi atau antar institusi untuk menekan kasus permasalahan yang ada di Indonesia (Tilano & Suwitri, 2019). Namun, kerjasama yang dilakukan harus

bersifat transparan, adil, bertanggung jawab dan efektif serta memperhatikan sosial ekonomi yang didasarkan pada konsensus masyarakat, dan memperhatikan yang lemah pada pengambilan keputusan. Permasalahan stunting di Indonesia harus melibatkan teori *Collaborative Governance*. Peran kolaborasi antar pemerintah, Sektor Swasta dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam menekan kasus stunting di Indonesia (Basyar & Puspaningtyas, 2022).

Kerjasama yang dilakukan membuahkan hasil yaitu memberikan ide dan solusi dalam menekan kasus stunting di Indonesia, Salah satunya di Kota Surabaya. Berdasarkan pada Peraturan Walikota Surabaya No 79 Tahun 2022 tentang penurunan stunting yang mengatakan bahwa dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan tercapainya tujuan pembangunan maka dibutuhkan adanya penurunan stunting (Jdih, 2022) Dalam peraturan tersebut bisa diartikan bahwa kesehatan stunting atau gizi buruk pada anak sangat berdampak pada pembangunan di Kota Surabaya dan negara Indonesia.



Gambar 1.2 Data Stunting Tahun 2020 – 2022 di Kota Surabaya
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya

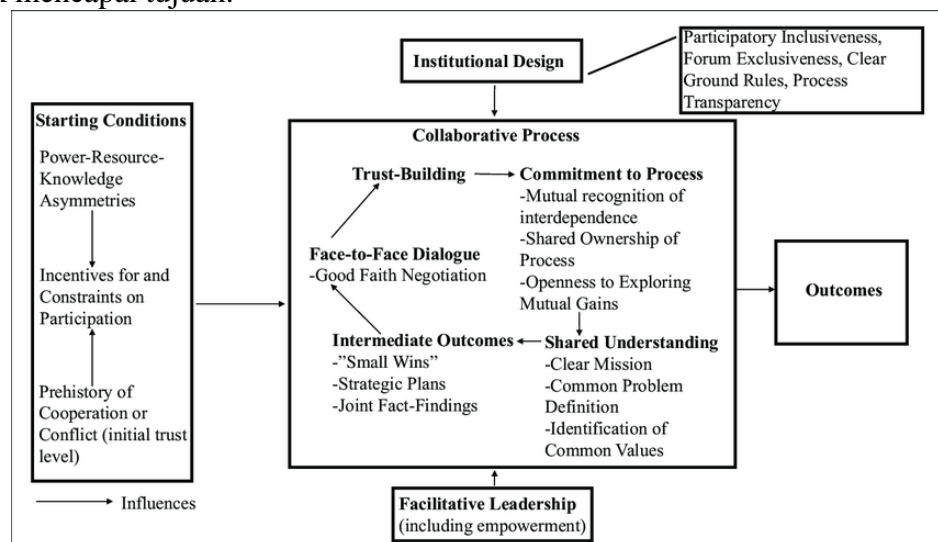
Kasus stunting di Surabaya terbilang menurun setiap tahunnya, Pada tahun 2020 terdapat 12,788 kasus dan turun pada tahun 2021 yaitu 6,722 kasus, lalu pada tahun 2022 turun menjadi 923 kasus lalu pada Februari tahun 2023 menurun menjadi 850 balita stunting, Pemerintah Kota Surabaya menargetkan bahwa tahun ini bisa mengatasi stunting hingga 0 kasus (Salman, 2022). Meskipun kasus stunting di Kota Surabaya menurun Pemerintah Kota Surabaya tidak menganggap hal ini sebagai hal biasa. Pemerintah Kota Surabaya menghimbau kepada masyarakat dan jajaran stakeholder untuk mengatasi kasus stunting ini. Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah beserta organisasi non Pemerintah berupa anggaran dan kegiatan sosialisasi dalam menekan kasus stunting di Kota Surabaya. Pada kegiatan sosialisasi ini dilakukan ke beberapa Kelurahan dan bekerja sama dengan sektor swasta.

Pemerintah Kota Surabaya cukup sukses dalam menurunkan kasus stunting, Karena jajaran instansi yang ikut serta membantu dalam memberikan solusi atas penekanan masalah stunting di Kota Surabaya Maka dari itu, Kota Surabaya cukup efektif dalam memberikan program – program yang berjalan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Salah satunya pada program “Jago Ceting”, Program

Jago Cegah Stunting bertujuan untuk menekan kasus stunting di Kota Surabaya dengan cara memberikan sosialisasi ke Kelurahan dan Kecamatan untuk solusi serta membantu memberikan penanganan yang dibutuhkan dalam Kelurahan atau Kecamatan tersebut (DP3APPKB Surabaya, 2021).

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Collaborative Governance merupakan salah satu konsep penyelenggaraan pemerintahan yakni penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif. Salah satu strategi yang dilakukan sebagai model rencana pemerintah yang dilakukan secara bersama untuk suatu negara dalam memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Maka dari itu, Indonesia menggunakan strategi tersebut dengan dasar untuk memaksimalkan kinerja dari berbagai pihak yaitu Pemerintah, Masyarakat, dan para stakeholder yang ikut serta dalam membangun negara Indonesia menjadi lebih baik. Menurut Ansell dan Gash (2008), Salah satu konsep yang diselenggarakan oleh aparaturnya Pemerintah dengan melibatkan para stakeholder non – state secara langsung terkait proses pembuatan kebijakan yang formal dengan cara konsensus dan deliberative dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada suatu negara tersebut serta mengimplementasikan kebijakan dengan tujuan yang dimaksud. Teori collaborative governance menurut Ansell dan Gash merupakan proses keputusan dalam suatu pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah, dan beberapa lembaga publik serta organisasi non pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik. secara bersama – sama untuk mencapai tujuan.



Gambar 2. 1 Model Collaborative Governance Menurut Ansell dan Gash
 Sumber: Ansell dan Gash (2008)

1. Kondisi Awal

Kondisi awal yang dimaksud adalah para stakeholder melakukan kepentingan dan visi misi yang dicapai, agar kerjasama terjalin baik dan sesuai dengan proses kerja pada tujuan yang hendak dicapai dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

2. Desain Kelembagaan

Pemimpin mengumpulkan para stakeholder untuk terlibat dalam negosiasi terkait permasalahan tersebut, *Collaborative Governance* disini berkaitan dengan konsensus yang berorientasi meskipun tidak pasti tercapai. Namun semua kolaborasi tidak semua membutuhkan konsensus. Desain kelembagaan pada kolaborasi menekankan pada aturan serta tata cara dalam proses prosedural yang bertujuan agar transparan dan membangun kerjasama yang baik antar para pemangku kepentingan dan pemimpin.

3. Kepemimpinan

Kepemimpinan dibutuhkan dalam suatu proses kolaborasi untuk mengatur jalannya negosiasi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Permasalahan memang seiring terjadi karena sikap kepemimpinan yang tidak sesuai, Namun bisa diperbaiki dengan cara musyawarah dan membangun kepercayaan, penetapan aturan dasar – dasar yang jelas dan pembagian keuntungan bersama.

4. Proses Kolaboratif

Pada variabel ini merupakan sangat penting dalam model *Collaborative Government*. Proses yang dilakukan adalah memberikan rasa saling percaya dan membangun komitmen dalam melakukan perencanaan yang dilakukan dengan kolaborasi dan melibatkan antar pihak lainnya. Sehingga kolaborasi yang dibangun memberikan visi dan misi yang jelas serta kesamaan dan pemahaman yang terarah dalam menjalankan proses rencana kolaborasi tersebut.

Pada model yang diberikan oleh Ansell dan Gash pada teori *Collaborative Government* memberikan efektivitas pada suatu kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah, Stakeholder, Masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara membangun kerjasama, dan saling percaya serta membangun visi dan misi yang jelas. Oleh karena itu, Permasalahan di Indonesia bisa diselesaikan secara kerjasama antar pihak pemangku kepentingan. Salah satunya permasalahan Stunting, Stunting bisa diselesaikan dengan cara kerjasama antar Pemerintah, Partisipasi masyarakat dan Para Stakeholder serta bisa menggunakan konsep dari teori *Collaborative Governmnet* menurut Ansell dan Gash.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan oleh Peneliti adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengetahui perspektif dari berbagai pihak terkait kondisi stunting di Kota Surabaya. Fokus penelitian ini adalah kolaborasi dengan indikator *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash yaitu :

1. Kondisi Awal
2. Desain Kelembagaan
3. Kepemimpinan
4. Proses Kolaboratif

Alasan Peneliti memilih 4 indikator *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash adalah karena untuk mengetahui bentuk kerjasama yang dilakukan antar Pemerintah dengan 4 aktor lainnya. Selain itu, Penulis juga berfokus pada faktor penghambat dan pendukung terhadap proses kolaboratif

yang dilakukan oleh para informan yang berkaitan dengan penanganan stunting di Kota Surabaya.

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Wahana Visi Indonesia Urban Surabaya. Alasan tempat tersebut menjadi tempat penelitian adalah untuk mengetahui data prevalensi penurunan stunting di Kota Surabaya serta bentuk kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi kesehatan stunting. Sumber data yang diambil adalah primer dan sekunder yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Penulis melakukan dokumentasi terhadap data yang dibutuhkan serta kepada objek yang terkait dengan masalah stunting di Kota Surabaya, Dengan mencari data grafik stunting serta peran kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta dan masyarakat dalam menurunkan kasus stunting di dalam publikasi jurnal dan artikel. Penulis juga mendapatkan data melalui penelitian terdahulu dan karya ilmiah yang sangat relevan. Selain itu, juga mendapatkan informasi lewat artikel, media massa.

D. PEMBAHASAN

Collaborative Governance Pada Penerapan Perwali No 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya

Penanganan stunting menjadi fokus utama bagi Pemerintah Kota Surabaya. Karena hal tersebut Pemerintah Kota membutuhkan kerjasama dari berbagai sektor organisasi Pemerintahan atau Non Organisasi Pemerintahan terkait penanganan stunting di Kota Surabaya. Kolaborasi pada penanganan stunting yang dilakukan adalah Pemerintah, Swasta, Media Massa, LSM, dan Akademisi. Kelima aktor ini melakukan kerjasama terkait dengan indikator teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash Berikut penjelasan Kolaborasi penanganan stunting terkait indikatornya :

Kondisi Awal

Kondisi awal merupakan awal proses terjadinya fenomena atau pengaruh adanya proses kolaborasi yang menyebabkan para stakeholder mempunyai target yang akan dicapai bersama – sama. Pengaruh adanya stunting di Kota Surabaya ini adalah faktor dari kemiskinan yang meningkat, serta kondisi awal prevalensi stunting sudah menurun dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Menurut Ansell dan Gash (2008), Kondisi awal merupakan keterkaitan hubungan antar stakeholder dan organisasi di luar Pemerintah dengan latar belakang yang berbeda untuk menjalin kerjasama yang baik dalam hubungan yang dijalankan. Hubungan kolaborasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peran masing – masing dari *Stakeholder*. Beberapa kegiatan Pemerintah dilakukan oleh bersama – sama dengan pihak Swasta, Media Massa, LSM, dan akademisi, kelima pihak ini sangat berhubungan sehingga dapat menjalankan proses kolaborasi penanganan stunting dengan benar. Tetapi beberapa kegiatan yang dilakukan tidak selalu kelima pihak ini terlibat, terkadang hanya 3 pihak saja yaitu Swasta, Akademisi, dan Mitra Pemerintahan yaitu Kelurahan atau Kecamatan.

Salah satu kegiatan nya adalah wilayah binaan dari kegiatan tersebut pihak LSM dan akademisi serta mitra Pemerintahan yaitu Kelurahan berkolaborasi untuk melakukan kegiatan atau *event* namun tidak lupa untuk meminta izin kepada pihak Dinas Kesehatan Kota Surabaya terkait penyelenggaraan kegiatan

tersebut. Oleh karena itu beberapa kegiatan dalam penanganan stunting memang tidak semua dilakukan bersama tetapi penanganan stunting di Kota Surabaya tetap terkoordinir oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Surabaya agar dapat terarah dan jelas tujuan yang mereka lakukan terhadap kegiatan – kegiatan tersebut. Oleh karena itu Penelitian terkait kondisi awal yang dilakukan oleh Peneliti sangat berhubungan dengan teori dari Ansell dan Gash yaitu untuk mengetahui bentuk kolaborasi yang dilakukan beberapa pihak harus jelas dalam latar belakang beserta peran yang dilakukan serta harus transparan dalam melakukan kolaborasi penanganan stunting di Kota Surabaya.

Desain Kelembagaan

Menurut Ansell dan Gash (2007) bahwa Desain Kelembagaan adalah aturan secara khusus tentang kolaborasi yang dilakukan secara transparan, musyawarah, serta adil dalam pelaksanaannya. Aturan kebijakan terkait penanganan stunting ini adalah SK Walikota Surabaya nomor 188.45/95/436.1.2/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya dan Perwali No 79 Tahun 2021 pada kedua aturan ini sudah baik dalam pelaksanaannya karena dari penerapan kedua aturan ini berbeda setiap sarasannya. Pada SK Walikota sasaran utamanya adalah untuk tim pelaksana dalam penanganan stunting atau *stakeholder* yang terlibat dari organisasi Pemerintahan maupun Pemerintahan, jika beberapa *stakeholder* melakukan kesalahan yang tidak memenuhi target dalam SK tersebut maka diberikan teguran agar bisa diperbaiki kembali dalam cara kerjanya. Selain itu untuk Perwali ini sasaran utamanya adalah Ibu-Ibu hamil, Ibu menyusui dan anak sampai dengan 6 bulan, Ibu menyusui dan anak usia 7 – 23 bulan dan seterusnya.

Dalam penerapannya sudah berjalan dengan baik, terkait kebijakan yang dibuat juga terbaru dan sudah melakukan revisi selama 2 kali terkait SK Walikota ini, dari revisi tersebut juga dilakukan dengan transparan sehingga diketahui oleh semua pihak yang terkait dengan TPPS (Tim Percepatan Penanganan Stunting) di Kota Surabaya. Terkait dengan kerjasama yang dilakukan juga sudah melakukan kesepakatan antar pihak yang terkait agar tidak memunculkan sebuah konflik dalam kolaborasi ini. Serta dalam melakukan negosiasi terkait kegiatan dalam penanganan stunting ini juga dilakukan secara transparan dalam partisipasinya terhadap penanganan stunting sesuai dengan aturan yang diterapkan.

Kepemimpinan

Menurut Ansell dan Gash Kepemimpinan adalah faktor yang berpengaruh terkait keberhasilan dalam sebuah kolaborasi. Untuk itu, pemimpin disini harus bisa mengatur jalannya proses kolaborasi yang dilakukan serta sanggup memfasilitasi para pemangku kepentingan dan membangun kepercayaan satu sama lain agar tidak menimbulkan konflik dalam kolaborasi tersebut. Dalam kaitannya dengan kolaborasi penanganan stunting ini adalah tercantum pada SK Walikota yang memberikan pernyataan bahwa ketua secara struktural yang mengatur TPPS (Tim Penanganan Percepatan Stunting) adalah Sekretaris Daerah Pemerintah dalam proses kolaborasi ini berperan sebagai mengatur jalannya proses kolaborasi serta memfasilitasi terkait data – data yang dibutuhkan oleh *stakeholder* lainnya dalam melakukan kegiatan penanganan stunting. Tetapi meskipun dalam TPPS sudah terstruktur bahwa ketua nya adalah Sekretaris

Daerah, Mereka punya tanggung jawab masing – masing dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang dibuat dalam SK Walikota tersebut. Pemerintah juga sudah melakukan tugasnya dengan baik dalam mengatur proses kolaborasi ini serta bertanggung jawab penuh terhadap proses kolaborasi ini dan sudah memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh pihak Media Massa, Swasta, dan LSM.

Proses Kolaboratif

Menurut Ansell dan Gash (2007) Proses kolaboratif adalah memberikan rasa saling percaya dan membangun komitmen dalam melakukan perencanaan yang dilakukan dengan kolaborasi dan melibatkan antar pihak lainnya. Sehingga kolaborasi yang dibangun memberikan visi dan misi yang jelas serta kesamaan dan pemahaman yang terarah dalam menjalankan proses rencana kolaborasi tersebut. Ansell dan Gash memberikan beberapa indikator terkait pelaksanaan proses kolaborasi agar berjalan dengan baik dan terarah beberapa indikator ini adalah membutuhkan adanya dialog tatap muka, Membangun kepercayaan satu sama lain, memberikan pemahaman bersama serta hasil dari proses kolaborasi tersebut atau *Outcome* menengah. Terkait dengan penanganan stunting di Kota Surabaya ini dari komunikasi melakukan dengan cara tatap muka dengan melakukan rapat seminggu sekali atau dua kali dengan para *stakeholder* dalam penanganan stunting, dalam peningkatan kepercayaan ini mereka memberikan kesatuan visi dan misi bagaimana cara membangun pemahaman serta meningkatkan rasa kepercayaan satu sama lain terkait proses kolaborasi yang dilakukan. Hasil sementara dari proses kolaborasi yang dilakukan adalah berhasil karena prevalensi stunting sudah berhasil menurun setiap tahunnya dapat dilihat dari data prevalensi stunting di Kota Surabaya. Tetapi meskipun hasil sementara sudah bagus tidak menutup kemungkinan bahwa prevalensi stunting kembali naik. Untuk itu dibutuhkan adanya pengawasan atau monitoring terkait kegiatan – kegiatan penanganan stunting di Kota Surabaya.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Proses kolaborasi pada penanganan stunting di Kota Surabaya juga memiliki faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaannya terutama dari faktor pendukung yang membuat prevalensi stunting di Kota Surabaya menurun adalah berupa bantuan serta *support* dari mitra Pemerintahan seperti Kelurahan, organisasi PKK dan jajaran dinas lainnya tidak hanya itu juga turut membantu organisasi non pemerintahan dari media massa, swasta, akademisi, dan LSM. Karena dari bantuan dan saling percaya satu sama lain terhadap para *Stakeholder* dapat memberikan dukungan bagi proses kolaborasi pada penanganan stunting.

Pada faktor penghambat adalah mengarah pada masyarakat dari Kota Surabaya yang memberikan tantangan kepada Pihak Dinas Kesehatan serta jajaran mitra Pemerintah lainnya terkait dengan mobilitas penduduknya sangat tinggi. Karena dari mobilitas yang tinggi ini susah untuk melakukan survei ke Rumah-Rumah warga yang menjadi penderita stunting. Oleh karena itu, Peneliti memberikan solusi cara mengatasinya dengan memberikan adanya program transmigrasi serta program Keluarga Berencana untuk pertumbuhan Penduduk di Kota Surabaya. Karena dengan adanya program – program ini masyarakat bisa terarah dan terjamin bahwa mereka penduduk Kota Surabaya dan merupakan

penderita stunting, sehingga pihak Kelurahan atau kecamatan atau Mitra Pemerintah lainnya bisa melakukan survei dengan mudah terhadap bantuan keluarga penderita stunting tersebut.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, *Collaborative Governance* pada penerapan Perwali No 79 Tentang Penanganan stunting di Kota Surabaya berjalan dengan baik terkait dengan proses kolaborasi terhadap Pemerintah, Media Massa, Swasta, LSM dan Akademisi melalui indikator – indikator teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, Kepemimpinan, dan proses kolaboratif sudah berjalan dengan baik serta proses kolaborasi yang dilakukan memberikan hasil bahwa data prevalensi stunting menurun setiap tahunnya. Serta dengan komunikasi, membangun rasa saling kepercayaan, dan membuat komitmen dalam proses kolaborasi ini lah yang membuat tujuan dan target nya berhasil dicapai.

Saran

Collaborative Governance pada penerapan Perwali No 79 Tentang Penanganan Stunting di Kota Surabaya diharapkan dapat memberikan rencana kedepan untuk penanganan stunting tahun kedepan dengan proses kolaborasi yang dilakukan Pemerintah, Swasta, Akademisi, Media Massa, dan LSM. Selain itu, lebih memperbanyak program – program kegiatan yang dibentuk bersama para 5 aktor tersebut agar bisa mempublikasikan kepada masyarakat serta bisa menjadi contoh bagi Kota lainnya untuk memotivasi terkait program – program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggryni, M., Mardiah, W., Hermayanti, Y., Rakhmawati, W., Ramdhanie, G. G., & Mediani, H. S. (2021). Faktor Pemberian Nutrisi Masa Golden Age dengan Kejadian Stunting pada Balita di Negara Berkembang. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1764–1776. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.967>
- Ansell, & Gash. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4).
- Arasti, F. (2021). *DEFINISI COLLABORATIVE GOVERNANCE*. Dictio.Id. <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-collaborative-governance/160412>
- Arianti, D., & Satlita, L. (2018). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN KONSERVASI MANGROVE BAROS DI DESA TIRTOHARGO KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL*.
- Basyar, M., & Puspaningtyas, A. (2022). Collaborative Governance in CSR Management Program for Slum Area Rehabilitation. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 7–8. <https://doi.org/10.26905>
- Bayu, D. (2022). *Prevalensi Stunting di Indonesia Capai 24,4% pada 2021*. DataIndonesia.Id.
- DP3APPKB Surabaya. (2021, October 19). *Jago Ceting, Program Pemkot Surabaya dan TP PKK Cegah Stunting*.

- <https://dp3appkb.surabaya.go.id/jago-ceting-program-pemkot-surabaya-dan-tp-pkk-cegah-stunting/>
- Ipan, Purnamasari, H., & Priyanti, E. (2021). *Collaborative governance dalam penanganan stunting*. 18(3), 2021–2383. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA>
- Jdih, S. (2022). PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 79 TAHUN 2022. *Jdih.Surabaya.Go.Id*.
- Jumaah, S., Dewi, D., Kartini, F., & Benita, N. (2022). COLLABORATIVE GOVERNANCE BERBASIS PENDEKATAN PENTA HELIX STAKEHOLDER DALAM MENGATASI PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR. *TheJournalish: Social and Government*, 3(2), 130–138. <https://doi.org/10.55314/tsg.v3i2.264>
- KEMENDAG RI. (2022). *MONITORING PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI*. DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH - KEMENTERIAN DALAM NEGERI. <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/DashPrev>
- Kompas. (2022, March 2). *Prevalensi Stunting di Jatim Tinggi, Ini Upaya BKKBN*. Kompas.Com. <https://surabaya.kompas.com/read/2022/03/02/172640078/prevalensi-stunting-di-jatim-tinggi-ini-upaya-bkkbn?page=all>
- kusnandar, viva budi. (2021). *10 Wilayah dengan Prevalensi Balita Stunting Terbesar di Jawa Timur*. Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/10-wilayah-dengan-prevalensi-balita-stunting-terbesar-di-jawa-timur>